

**MODEL OPTIMALISASI ASET TETAP  
(STUDI PADA SATUAN KERJA PENGADILAN  
DI WILAYAH JAWA TENGAH)**

**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Strata 2 (S-2)**

**Program Magister Manajemen**



**Disusun oleh:**

**Abu Sahid**

**NIM 20401900001**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
SEMARANG**

**2023**

**MODEL OPTIMALISASI ASET TETAP  
(STUDI PADA SATUAN KERJA PENGADILAN  
DI WILAYAH JAWA TENGAH)**

**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Strata 2 (S-2)**

**Program Magister Manajemen**



**Disusun oleh:**

**Abu Sahid**

**NIM 20401900001**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
SEMARANG**

**2023**

**TESIS**

**MODEL OPTIMALISASI ASET TETAP  
(STUDI PADA SATUAN KERJA PENGADILAN  
DI WILAYAH JAWA TENGAH)**

Disusun oleh:

Abu Sahid

NIM 20401900001

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan  
ke hadapan sidang panitia ujian tesis

Program Magister Manajemen  
UNISSULA  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 Agustus 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si.

NIK 210491028

MODEL OPTIMALISASI ASET TETAP  
(STUDI PADA SATUAN KERJA PENGADILAN  
DI WILAYAH JAWA TENGAH)

Disusun oleh:

Abu Sahid

NIM 20401900001

Telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Penguji I

Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si.  
NIK 210491028

Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D.  
NIK 210403049

Penguji II

Dr. Hj. Siti Sumiati, S.E., M.Si.  
NIK 210492029

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Manajemen  
tanggal 31 Agustus 2023

Ketua Program Studi Magister Manajemen,

Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si.  
NIK 210491028

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abu Sahid

NIM : 20401900001

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Model Optimalisasi Aset Tetap (Studi pada Satuan Kerja Pengadilan di Wilayah Jawa Tengah)” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, 31 Agustus 2023

Pembimbing

Yang menyatakan,

Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si.  
NIK 210491028

Abu Sahid  
NIM 20401900001

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abu Sahid  
NIM : 20401900001  
Program Studi : Magister Manajemen  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**Model Optimalisasi Aset Tetap (Studi pada Satuan Kerja Pengadilan di Wilayah Jawa Tengah)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Abu Sahid

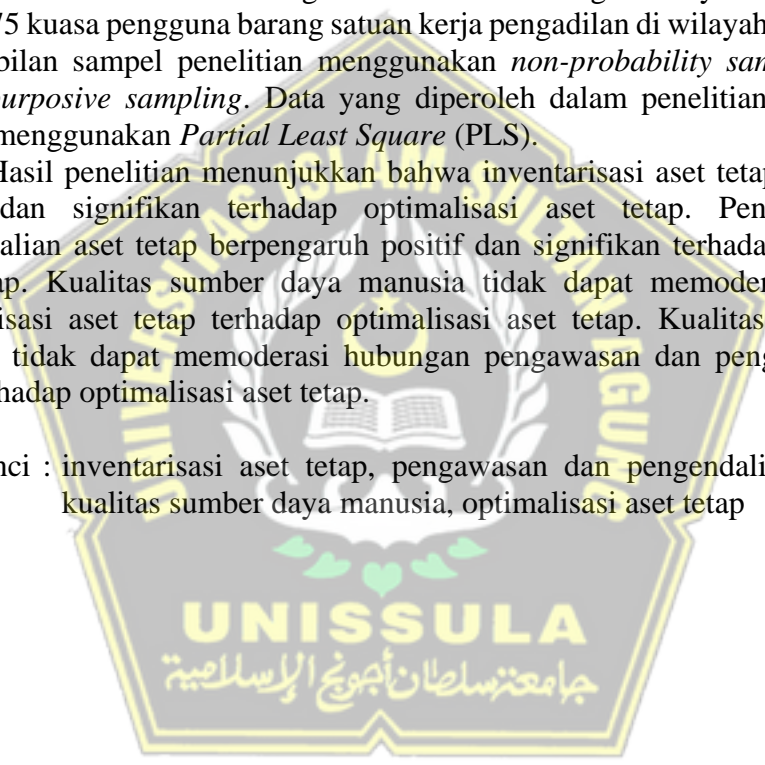
## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model optimalisasi aset tetap dengan menguji pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap serta pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap. Di samping itu, penelitian ini juga menguji pengaruh variabel moderasi kualitas sumber daya manusia dalam hubungan antara inventarisasi aset tetap dan optimalisasi aset tetap serta hubungan antara pengawasan dan pengendalian aset tetap dan optimalisasi aset tetap.

Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 kuasa pengguna barang satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Kualitas sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap. Kualitas sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

Kata kunci : inventarisasi aset tetap, pengawasan dan pengendalian aset tetap, kualitas sumber daya manusia, optimalisasi aset tetap



## ABSTRACT

*The objective of this study is to develop a fixed asset optimization model by examining the effect of fixed asset inventory on fixed asset optimization and the effect of fixed asset monitoring and control on fixed asset optimization. In addition, this study also examines the effect of moderating variables on the quality of human resources in the relationship between fixed asset inventory and fixed asset optimization and the relationship between fixed asset monitoring and control and fixed asset optimization.*

*The research was conducted using a survey method by distributing questionnaires to 75 proxy of asset users in the court working unit in the Central Java region. Sampling research using non-probability sampling with purposive sampling technique. The data obtained in this study were analyzed using Partial Least Square (PLS).*

*The results of the study show that the inventory of fixed assets has a positive and significant effect on the optimization of fixed assets. Monitoring and control of fixed assets has a positive and significant effect on the optimization of fixed assets. The quality of human resources cannot moderate the relationship between fixed asset inventory and fixed asset optimization. The quality of human resources cannot moderate the relationship of supervision and control of fixed assets to the optimization of fixed assets.*

*Keywords : inventory of fixed assets, supervision and control of fixed assets, quality of human resources, optimization of fixed assets*



UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis dalam pengerjaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus pembimbing yang memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Dosen Penguji Tesis I;
4. Bapak Dr. Hj. Siti Sumiati, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Tesis II;
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mencurahkan segala ilmu, fasilitas, dan dukungan selama proses studi;
6. Kuasa pengguna barang pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini;
7. Semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah swt. berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Semarang, 31 Agustus 2023



Abu Sahid



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Akademik .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.1.1 Inventarisasi Aset Tetap .....	8

2.1.2	Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap .....	10
2.1.3	Kualitas Sumber Daya Manusia .....	11
2.1.4	Optimalisasi Aset Tetap .....	12
2.1.5	Penelitian Terdahulu.....	13
2.2	Hipotesis Penelitian .....	16
2.3	Model Empiris Penelitian .....	16
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	18
3.2	Teknik Sampling .....	18
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	19
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	19
3.5	Variabel dan Indikator.....	20
3.6	Teknik Analisis.....	22
3.6.1	Analisis Deskriptif Variabel .....	22
3.6.2	Analisis Uji <i>Partial Least Square</i> .....	22
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1	Deskripsi Responden .....	29
4.2	Deskripsi Variabel.....	31
4.2.1	Variabel Inventarisasi Aset Tetap .....	31
4.2.2	Variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap .....	33
4.2.3	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia .....	34
4.2.4	Variabel Optimalisasi Aset Tetap .....	36
4.3	Analisis Statistik.....	37

4.3.1	Evaluasi <i>Measurement (Outer) Model</i> .....	37
4.3.2	Pengujian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	42
4.4	Pengujian Hipotesis .....	43
4.4.1	Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap .....	45
4.4.2	Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap .....	45
4.4.3	Dampak Moderasi Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap.....	45
4.4.4	Dampak Moderasi Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap .....	46
4.5	Pembahasan .....	47
4.5.1	Inventarisasi Aset Tetap .....	47
4.5.2	Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap .....	48
4.5.3	Kualitas Sumber Daya Manusia.....	49
4.5.4	Optimalisasi Aset Tetap .....	51
BAB V	PENUTUP .....	53
5.1	Simpulan.....	53
5.1.1	Simpulan Rumusan Masalah .....	53
5.1.2	Simpulan Hipotesis.....	54
5.2	Implikasi Teoritis.....	54
5.3	Implikasi Manajerial.....	55
5.4	Keterbatasan Studi.....	56
5.5	Agenda Penelitian Mendatang.....	56

DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator Variabel .....	21
Tabel 4.1	Deskripsi Responden.....	29
Tabel 4.2	Deskripsi Variabel.....	31
Tabel 4.3	Tanggapan Responden terhadap Inventarisasi Aset Tetap.....	32
Tabel 4.4	Tanggapan Responden terhadap Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap.....	33
Tabel 4.5	Tanggapan Responden terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	35
Tabel 4.6	Tanggapan Responden terhadap Optimalisasi Aset Tetap.....	36
Tabel 4.7	<i>Result for Outer Loading</i> .....	38
Tabel 4.8	<i>Result for Outer Loading</i> .....	39
Tabel 4.9	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	40
Tabel 4.10	<i>Cronbach Alpha</i> .....	41
Tabel 4.11	<i>Composite Reliability</i> .....	41
Tabel 4.12	<i>R-Square</i> .....	42
Tabel 4.13	Uji Hipotesis Sebelum Moderasi .....	43
Tabel 4.14	Uji Hipotesis Setelah Moderasi.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Empiris Penelitian .....	17
Gambar 4. 1 <i>Algorithm Moderation</i> .....	44





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kuesioner.....	61
Lampiran 2. Hasil Olah Data.....	67



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa telah membangkitkan kesadaran bersama mengenai cita-cita terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi sasaran reformasi adalah keuangan negara.

Reformasi keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut telah mengubah paradigma lama yang dianggap tidak lagi dapat mengikuti dinamika perkembangan untuk mengatasi berbagai kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, serta pemeriksaan keuangan.

Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara berusaha mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik, diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sendiri secara umum meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara/daerah, pengelolaan badan layanan umum, perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Salah satu hal penting dalam perbendaharaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (dalam terminologi akuntansi secara umum biasa disebut aset). Dalam akuntansi, ekuitas (modal) adalah aset dikurangi kewajiban (utang). Apabila aset tidak diketahui nilainya, tentunya ekuitas negara tidak bisa diketahui dengan baik. Karena itulah, diperlukan adanya manajemen aset yang baik.

Manajemen aset negara sering disebut pula sebagai pengelolaan barang milik negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Siregar (2004) menyebutkan bahwa manajemen aset terbagi atas lima tahapan kerja yang saling berhubungan, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian. Masih menurut Siregar (2004), tujuan manajemen aset, yaitu efisiensi pemanfaatan dan pemilikan, terjaga nilai ekonomis dan objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan, penggunaan serta alih penguasaan.

Optimalisasi aset sendiri dapat dikatakan sebagai tujuan utama dalam manajemen aset. Berdasarkan studi Nurdiana et al. (2016), Demetouw et al. (2017), Jusmin (2018), dan Sriastiti et al. (2020), variabel yang paling mempengaruhi optimalisasi aset, yaitu inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian. Selain itu, faktor lain yang mendukung keberhasilan inventarisasi aset serta

pengawasan dan pengendalian yang tentunya akan berdampak pada optimalisasi aset adalah kualitas sumber daya manusia yang mengelola aset. Karena itu, kualitas sumber daya manusia diperlukan sebagai variabel moderasi antara inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi aset.

Dalam pada itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan negara yang memiliki 924 satuan kerja pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun Pengadilan Tinggi Semarang merupakan koordinator wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Jawa Tengah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang membawahkan 75 satuan kerja, yang terdiri dari 2 pengadilan tinggi, 35 pengadilan negeri, 36 pengadilan agama, 1 pengadilan tata usaha negara, dan 1 pengadilan militer.

Fenomena yang ada pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah adalah terdapat banyak rumah negara yang kondisinya rusak berat, bahkan bisa dikatakan menjadi aset *idle* (menganggur). Rumah negara yang diperuntukkan bagi hakim dan pejabat dengan kondisi rusak berat tentu tidak layak dari segi keamanan dan kenyamanan. Apalagi bagi hakim yang memperoleh anggaran untuk bantuan sewa rumah dinas hakim maka tentunya lebih memilih untuk menyewa rumah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset (dalam hal ini adalah aset tetap) belum optimal.

Fenomena lain terkait optimalisasi aset tetap adalah perhitungan tarif untuk sewa rumah negara. Masih terdapat satuan kerja yang belum mengenakan tarif sewa

negara sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara.

Selain itu, pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga, misalnya untuk kantin, tempat ATM, ataupun usaha lainnya, masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu belum memedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Satuan kerja juga kurang aktif mengoptimalkan aset tetap yang ada sehingga kurang bisa menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan aset tetap.

Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tersebut diduga penyebabnya adalah karena lemahnya pelaksanaan pengelolaan atau manajemen aset tetap. Sehubungan dengan pembahasan tersebut di atas, diperlukan adanya studi mengenai model optimalisasi aset tetap, khususnya pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kontroversi studi (*research gap*) dan fenomena bisnis maka rumusan masalah dalam studi ini adalah “Bagaimana mengembangkan model optimalisasi aset tetap.” Selanjutnya, pertanyaan penelitian (*question research*) adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap?
- 2) Bagaimana pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap?

- 3) Bagaimana dampak moderasi kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap?
- 4) Bagaimana dampak moderasi kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis secara empiris pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.
- 2) Menganalisis secara empiris pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.
- 3) Menganalisis secara empiris dampak moderasi kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.
- 4) Menganalisis secara empiris dampak moderasi kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- 1) Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan berupa model optimalisasi aset tetap.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melengkapi kepentingan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil studi ini bagi instansi pemerintah dapat dipakai sebagai referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan, khususnya dalam hal optimalisasi aset tetap.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Sugiama (2008) menyebutkan bahwa manajemen aset merupakan suatu ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Sementara itu, Siregar (2004) menjelaskan bahwa manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, metode, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan risiko yang timbul terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi keselamatan atau kepatuhan pada aturan lingkungan hidup dari aset fisik perusahaan.

Menurut Siregar (2004), tahapan manajemen aset meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Dari kelima tahapan tersebut, secara khusus, penelitian ini akan membahas mengenai inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset, serta optimalisasi aset.

##### **2.1.1 Inventarisasi Aset Tetap**

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis,

alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset (Siregar, 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara. Kepala kantor selaku kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Inventarisasi barang milik negara secara umum, termasuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Khusus persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh setiap tahun.

Dalam studi ini, inventarisasi aset tetap didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset tetap, baik itu dari aspek fisik (misalnya, bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, dan alamat), maupun yuridis/legal yang dimiliki (misalnya, status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, dan batas akhir penguasaan).

### **2.1.2 Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap**

Pengawasan dan pengendalian aset merupakan satu permasalahan perlu menjadi perhatian. Salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Melalui SIMAN, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMAN, aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan dapat meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Siregar, 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian barang milik negara dilakukan melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau melalui pemantauan dan investigasi. Pemantauan dan penertiban dilakukan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara yang berada di dalam penguasaannya. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Pengguna barang dan kuasa

pengguna barang menindaklanjuti hasil audit dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam studi ini, pengawasan dan pengendalian aset tetap didefinisikan sebagai kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tetap guna memastikan bahwa segala aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan, misalnya KKN, yang pada akhirnya tercipta transparansi kerja.

### **2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia adalah atribut yang seharusnya dimiliki oleh sumber daya manusia sesuai tuntutan tugas atau pekerjaannya. Kualitas sumber daya manusia memiliki tantangan utama dalam mengelola sumber daya yang baik dengan efektif dan menghilangkan praktik-praktik yang tidak efektif. Dalam kondisi seperti itu, pimpinan dituntut untuk selalu mengembangkan cara-cara baru untuk dapat menarik dan mempertahankan para pejabat dan staf berkualitas yang diperlukan instansi agar tetap mampu bersaing (Pekei, 2019).

Sumber daya manusia merupakan kuantitas manusia yang dapat diserap dalam organisasi. Agar dapat memiliki sumber daya manusia yang baik harus melalui penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara adil. Karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar

terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi.

Dalam studi ini, kualitas sumber daya manusia didefinisikan sebagai atribut yang seharusnya dimiliki oleh pegawai yang mengelola aset tetap sesuai tuntutan tugas dan pekerjaannya.

#### **2.1.4 Optimalisasi Aset Tetap**

Optimalisasi aset merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki dilakukan diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang (Siregar, 2004).

Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah, atau faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Optimalisasi dapat dilakukan melalui analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use analysis*) dengan memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*),

memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*) (Siregar, 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, optimalisasi barang milik negara dalam bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.

Dalam studi ini, optimalisasi aset tetap didefinisikan sebagai kegiatan dalam manajemen aset tetap yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tetap tersebut.

#### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Studi Sriastiti et al. (2020) menunjukkan bahwa inventarisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi aset. Legal audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset. Penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset. Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi aset.

Studi Ardiani (2020) menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen, yaitu inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset

tetap. Secara parsial, variabel inventarisasi aset dan legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Adapun variabel penilaian aset berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

Hasil berbeda diperoleh dari studi Umbora et al. (2018) yang menunjukkan secara simultan bahwa variabel inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Namun, secara parsial persediaan dan identifikasi tidak berpengaruh. Sementara itu, legal audit dan penilaian aset cukup berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

Studi Jusmin & Nursalim (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap. Begitu pun juga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penilaian aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap serta ada pengaruh yang positif antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalitas aset tetap. Namun, antara legal audit aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.

Hasil lain diperoleh dari studi Pauweni et al. (2017) yang menunjukkan bahwa secara parsial inventarisasi, penilaian dan kondisi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, sedangkan legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Nilai dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa inventarisasi, legal audit, penilaian dan kondisi aset bersama-sama berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset yaitu sebesar 58,8%, dan sisanya 41,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Studi Atikoh et al. (2017) mengenai penerapan pengelolaan aset tetap meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian ini dikategorikan baik terkait dengan persepsi penerapan manajemen aset. Namun, tidak satu pun dari variabel tersebut yang dikategorikan sangat baik.

Sementara itu, studi Demetouw et al. (2017) membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap. Begitu pun juga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penilaian aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap serta antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalitas aset tetap. Namun, antara legal audit aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap kurang ada pengaruh yang signifikan.

Studi lain dari Antoh (2017) menunjukkan bahwa secara individual inventarisasi aset tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap, secara individual legal audit aset terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap, secara individual penilaian aset tidak terbukti berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap, serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Adapun hasil analisis secara bersama-sama/serentak menunjukkan bahwa keempat variabel, yaitu inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh signifikan/positif terhadap optimalisasi aset tetap.

Sementara itu, studi Nurdiana et al. (2016) menunjukkan bahwa inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif



terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Namun, legal audit aset dan penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.

## 2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Apabila inventarisasi aset tetap baik maka optimalisasi aset tetap makin meningkat.

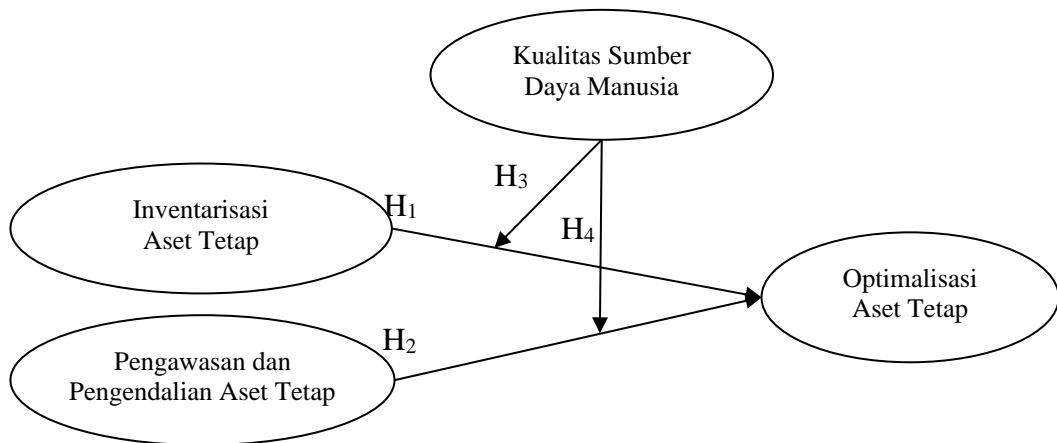
H<sub>2</sub> : Apabila pengawasan dan pengendalian aset tetap baik maka optimalisasi aset tetap makin meningkat.

H<sub>3</sub> : Apabila kualitas sumber daya manusia baik maka mampu memoderasi pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

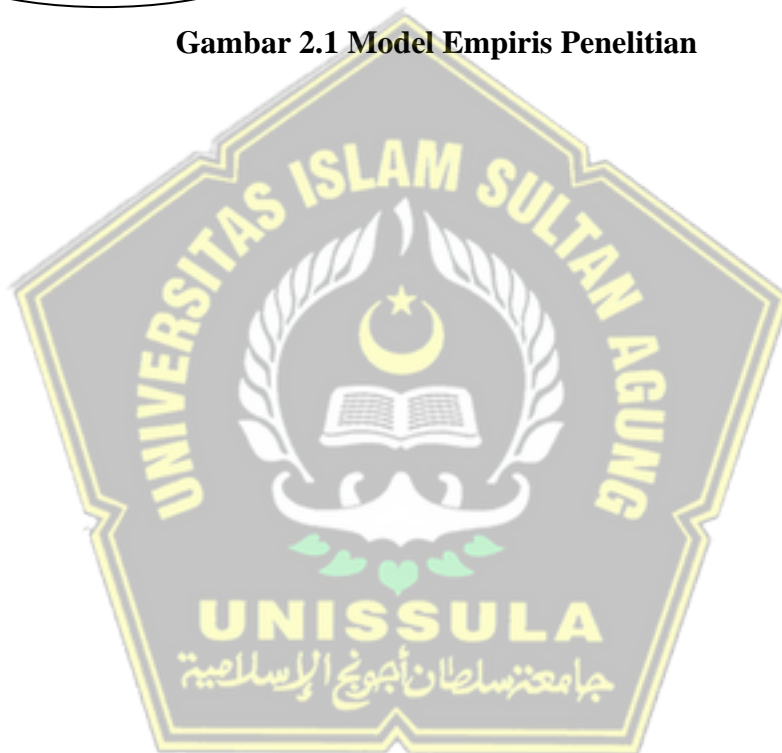
H<sub>4</sub> : Apabila kualitas sumber daya manusia baik maka mampu memoderasi pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

## 2.3 Model Empiris Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas, model empiris penelitian ini tampak pada Gambar 2.1. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa optimalisasi aset dipengaruhi oleh inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia memoderasi hubungan antara inventarisasi aset dan optimalisasi aset; serta memoderasi hubungan antara pengawasan dan pengendalian aset dan optimalisasi aset.



**Gambar 2.1 Model Empiris Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*). Singarimbun (1995) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat penjelasan adalah penelitian yang menyoroti pengaruh antarvariabel penentu serta menguji hipotesis yang diajukan, di mana uraiannya mengandung deskripsi akan tetapi terfokus pada hubungan variabel. Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut meliputi inventarisasi aset tetap, pengawasan dan pengendalian aset tetap, kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi aset tetap.

#### **3.2 Teknik Sampling**

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah.

Adapun pengambilan sampel penelitian menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* artinya pengambilan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik populasi: a) terlibat dalam pengelolaan barang milik negara; b) representasi dari satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan karakteristik tersebut ditentukan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah kuasa pengguna barang satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah karena dianggap secara representatif mewakili sehubungan dengan kewenangan

yang dimilikinya. Karena itu, sampel ditentukan berjumlah 75 responden sesuai dengan jumlah satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyeknya (Widodo, 2019). Data primer studi adalah mencakup inventarisasi aset tetap, pengawasan dan pengendalian aset tetap, kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi aset tetap.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data tersebut meliputi jumlah kuasa pengguna barang yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah serta identitas responden yang diperoleh dari basis data (*database*) Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner, yaitu pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan pada responden. Kuesioner disebarkan melalui Google Forms.
2. Pengambilan data yang diperoleh melalui kuesioner dilakukan menggunakan pengukuran interval dengan ketentuan skornya adalah sebagai berikut.

<b>Sangat Tidak Setuju</b>	1	2	3	4	5	<b>Sangat Setuju</b>
----------------------------	---	---	---	---	---	----------------------

### 3.5 Variabel dan Indikator

Variabel penelitian ini mencakup inventarisasi aset tetap, pengawasan dan pengendalian aset tetap, kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi aset tetap. Adapun masing-masing indikator tampak pada Tabel 3.1.



**Tabel 3.1 Indikator Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Sumber
1	<b>Inventarisasi Aset Tetap</b> Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset tetap, baik itu dari aspek fisik (misalnya, bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, dan alamat), maupun yuridis/legal yang dimiliki (misalnya, status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, dan batas akhir penguasaan).	1. Proses inventarisasi aset tetap 2. Pembaruan <i>database</i> aset tetap 3. Akurasi pendataan aset tetap	Atikoh et al. (2017)
2	<b>Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap</b> Kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tetap guna memastikan bahwa segala aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan, misalnya KKN, yang pada akhirnya tercipta transparansi kerja.	1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tetap 2. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 3. Tindak lanjut audit 4. Penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung	Atikoh et al. (2017)
3	<b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b> Atribut yang seharusnya dimiliki oleh pegawai yang mengelola aset tetap sesuai tuntutan tugas dan pekerjaannya.	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Keaktifan 4. Kualitas 5. Pengelolaan SDM 6. Koordinasi 7. Peningkatan SDM	Pekei (2019)
4	<b>Optimalisasi Aset Tetap</b> Kegiatan dalam manajemen aset tetap yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tetap tersebut.	1. Pelaksanaan optimalisasi aset tetap 2. Pelibatan pihak ketiga 3. Peningkatan PNBP 4. Efisiensi pelaksanaan	Atikoh et al. (2017)

## **3.6 Teknik Analisis**

### **3.6.1 Analisis Deskriptif Variabel**

Analisis deskriptif adalah analisis yang ditujukan pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian (Umar, 2012). Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan analisis nonstatistik untuk menganalisis data kualitatif, yaitu dengan membaca tabel-tabel, grafik, dan angka-angka berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel penelitian, kemudian dilakukan uraian dan penafsiran.

### **3.6.2 Analisis Uji *Partial Least Square***

Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah permodelan persamaan struktural dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pendekatan ini digunakan karena pendugaan *variable latent* dalam PLS adalah sebagai *exact* kombinasi linier dari indikator sehingga mampu menghindari masalah *indeterminacy* dan menghasilkan skor komponen yang tepat. Di samping itu, metode analisis PLS dianggap *powerful* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi, dan ukuran sampel tidak harus besar. Adapun langkah-langkah pengujian model empiris penelitian berbasis PLS dengan *software* SmartPLS adalah sebagai berikut.

### 3.6.2.1 Spesialisasi Model

Analisis jalur hubungan antarvariabel terdiri atas:

- 1) *Outer model*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestnya. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis persamaannya:

$$y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + e \text{ (tanpa moderasi)}$$

$$y_2 = a_1x_1/x_1-x_3 + a_2x_2/x_2-x_3 + e \text{ (dengan moderasi)}$$

*Outer model* dengan indikator refleksif masing-masing diukur dengan:

- a) *Convergent validity*, yaitu korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini, *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup karena merupakan tahap awal pengembangan skala pengukuran dan jumlah indikator per konstruk tidak besar, berkisar antara 1 sampai 4 indikator.
- b) *Discriminant validity*, yaitu pengukuran indikator refleksif berdasarkan *cross loading* dengan variabel latennya. Metode lain dengan membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk, dengan korelasi antarkonstruk lainnya dalam model. Jika nilai pengukuran awal kedua metode tersebut lebih baik dibandingkan dengan nilai konstruk lainnya dalam model maka dapat disimpulkan konstruk tersebut memiliki nilai *discriminant validity* yang baik dan sebaliknya. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,5.

$$AVE = \frac{\Sigma \lambda_i^2}{\Sigma \lambda_i^2 + \Sigma_i \text{var}(\epsilon_i)}$$



c) *Composite Reliability*, yaitu indikator yang mengukur konsistensi internal dari indikator pembentuk konstruk menunjukkan derajat yang mengindikasikan *common latent (unobserved)*. Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit adalah 0,7, meskipun bukan merupakan standar absolut.

$$pc = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum \text{var}(\varepsilon_i)}$$

2) *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antarvariabel laten (*structural model*), disebut juga *inner relation*, menggambarkan hubungan antarvariabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifes di skala *zero means* dan unit varian sama dengan satu sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari *inner model* yang diperoleh adalah:

$$\eta_1 = \gamma_{1.1} \xi_1 + \gamma_{1.2} \xi_2$$

$$\eta_2 = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 + \rho_{2.1} \eta_1$$

*Weight relation*, estimasi nilai kasus variabel laten, *inner* dan *outer model* memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. Setelah itu diperlukan definisi *weight relation*. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS, yakni:

$$\xi_b = \sum_{kb} W_{kb} X_{kb}$$

$$\eta_1 = \sum_{ki} W_{ki} X_{ki}$$

$W_{kb}$  dan  $W_{ki}$  adalah  $kweight$  yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten endogen ( $\eta$ ) dan eksogen ( $\xi$ ). Estimasi variabel laten adalah linier agregat dari indikator yang nilai  $weight$ -nya didapat dengan prosedur estimasi PLS seperti dispesifikasi oleh *inner* dan *outer* model dengan variabel laten endogen (dependen) adalah  $\eta$  dan variabel laten eksogen adalah  $\xi$  (*independent*), sedangkan  $\zeta$  merupakan residual dan  $\beta$  dan  $\gamma$  adalah matriks koefisien jalur (*path coefficient*).

*Inner model* untuk mengukur hubungan variabel eksogen dengan variabel endogen yang diteliti. Kriteria pengujian bila nilai t-hitung atau t-statistik lebih besar dibanding t-tabel atau p-value lebih  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Apabila nilai Q-square  $> 0$  menunjukkan model memiliki *predictive relevance*, sebaliknya jika nilai Q-square  $\leq 0$  menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevant*. Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1-R1^2)(1-R2^2)\dots(1-Rp^2)$$

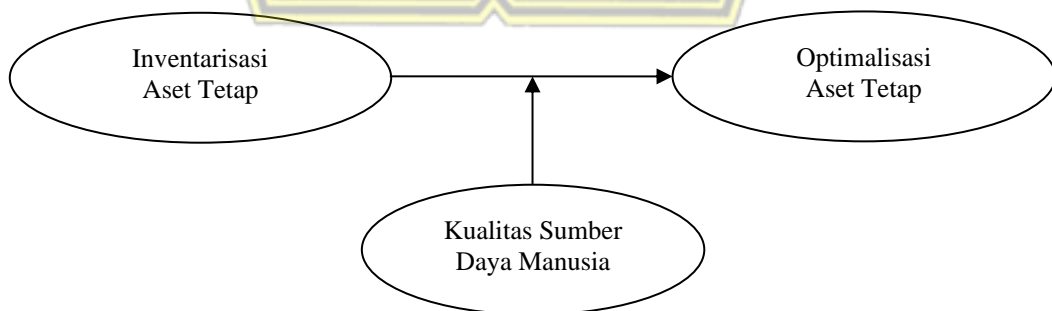
dengan  $(1-R1^2)(1-R2^2)\dots(1-Rp^2)$  adalah *R-Square* eksogen dalam model persamaan. Dengan asumsi data terdistribusi bebas (*distribution free*), model struktural pendekatan prediktif PLS dievaluasi dengan *R-Square* untuk konstruk endogen (dependen), *Q-square test* untuk relevansi prediktif, t-statistik dengan tingkat signifikansi setiap koefisien *path* dalam model struktural.

### 3.6.2.2 Analisis Efek Moderasi

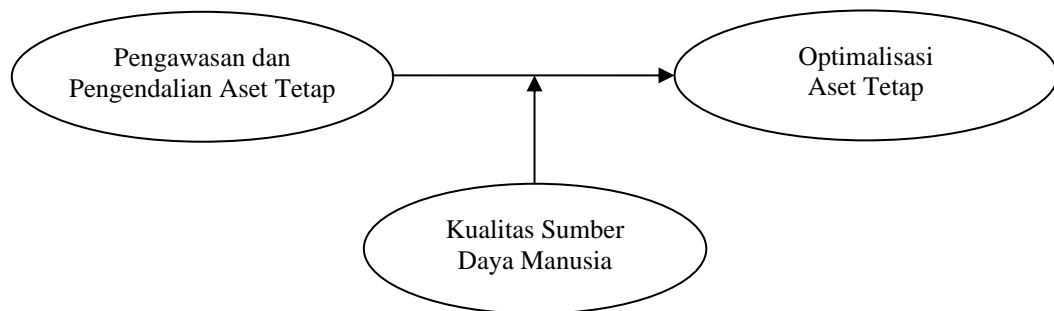
*Pertama*, variabel kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap. *Kedua*, variabel kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap. Variabel moderasi dapat diketahui dari pengaruh interaksi dua arah antara variabel independen dengan variabel moderasi dalam memprediksi variabel dependen. Contoh model persamaan hubungan dalam analisis regresi moderasi adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_1 + b_2 M_1 + b_3 X_1 * M_1 \dots\dots\dots(\text{Solimun, 2011})$$

Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu moderasi murni (*pure moderation*), moderasi semu (*quasi moderation*), moderasi potensial (*homoligiser moderation*), dan moderasi sebagai prediktor (*predictor moderation*). Adapun identifikasi permodelan hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap yang dimoderasi kualitas sumber daya manusia ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan hubungan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap yang dimoderasi kualitas sumber daya manusia ditunjukkan pada Gambar 3.2.



**Gambar 3.1 Permodelan Hubungan Inventarisasi Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap yang Dimoderasi Kualitas Sumber Daya Manusia**



**Gambar 3.2 Permodelan Hubungan Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap yang Dimoderasi Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Gambar 3.1 dan 3.2 dapat dijelaskan klasifikasi efek moderasi dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengklasifikasian peran demografi pada pengaruh variabel inventarisasi aset tetap serta pengawasan dan pengendalian aset tetap dengan kualitas sumber daya manusia ditentukan sesuai jenis moderasi di atas, serta dalam pengolahannya diolah secara simultan:

- 1) Jika nilai koefisien pengaruh ( $b_2$ ) tidak signifikan, dan variabel interaksi ( $b_3$ ) signifikan maka tipe moderasi diklasifikasikan sebagai moderasi murni (*pure moderation*).
- 2) Jika nilai koefisien pengaruh antara ( $b_2$ ) signifikan, dan variabel interaksi sebagai ( $b_3$ ) signifikan maka tipe moderasi diklasifikasikan moderasi semu (*quasi moderation*).
- 3) Jika nilai variabel interaksi ( $b_3$ ) tidak signifikan maka tipe moderasi diklasifikasikan sebagai moderasi potensial (*homologiser moderation*).
- 4) Jika nilai koefisien pengaruh antara ( $b_2$ ) signifikan, dan variabel interaksi ( $b_3$ ) tidak signifikan maka tipe moderasi diklasifikasikan sebagai prediktor moderasi (*predictor moderation*).

### 3.6.2.3 Evaluasi Model

Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk blok indikator. Model struktur alat *inner model* dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan, yaitu dengan melihat  $R^2$  untuk konstruk laten eksogen dengan menggunakan ukuran *Stone Gaiser Q-Square test* dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat melalui prosedur *bootstrapping*.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Responden

Hasil penyebaran kuesioner penelitian diperoleh sebanyak 75 kuesioner yang terisi lengkap dan dapat diolah. Deskripsi responden dalam hal ini dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Deskripsi Responden

No.	Karakteristik	Sampel N = 75	
		Jumlah	Persentase (%)
1	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Laki-laki	53	70,67
	Perempuan	22	29,33
2	<b>Usia Responden</b>		
	30–40 tahun	11	14,67
	41–60 tahun	64	85,33
3	<b>Tingkat Pendidikan</b>		
	SMA/SMK/Sederajat	1	1,33
	D4/S-1	51	68,00
	S-2	23	30,67
4	<b>Masa Kerja</b>		
	10–15 tahun	13	17,33
	>15 tahun	62	82,67

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari Tabel 4.1, berdasarkan karakteristik jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih besar, yaitu 53 responden (70,67%) dibandingkan dengan responden perempuan sebanyak 22 responden (29,33%). Kondisi ini membawa keuntungan tersendiri, yaitu kuasa pengguna barang yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa

Tengah yang didominasi pegawai laki-laki secara umum memiliki kemampuan fisik dan mobilitas yang lebih baik dibandingkan perempuan.

Berdasarkan karakteristik usia responden menunjukkan bahwa dari 75 responden didominasi oleh responden berusia kisaran dari 41–60 tahun, yaitu sebesar 85,33%. Jadi, secara umum responden dari kuasa pengguna barang yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah masih tergolong usia produktif dan memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja.

Berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pendidikan D-4/S-1 menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 51 responden (68,00%), disusul latar belakang pendidikan S-2, yaitu 23 responden (30,67%), dan 1 responden (1,33%) memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK/ sederajat. Kondisi ini membawa dampak baik karena kuasa pengguna barang yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi sehingga memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan karakteristik masa kerja menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja >15 tahun merupakan responden terbanyak, yaitu sebanyak 62 responden (82,67%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kuasa pengguna barang yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah merupakan pegawai yang memiliki pengalaman yang memadai.

## 4.2 Deskripsi Variabel

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan, antara lain, inventarisasi aset tetap, pengawasan dan pengendalian aset tetap, kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi aset tetap. Studi ini menggunakan kriteria rentang sebesar 1,33. Oleh karena itu, interpretasi nilai adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Deskripsi Variabel**

No.	Rentang	Kriteria
1	1,00–2,33	Rendah
2	2,34–3,66	Sedang
3	3,67–5,00	Tinggi

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner kepada kuasa pengguna barang pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah dengan jumlah 75 responden diperoleh deskripsi masing-masing variabel sebagai berikut.

### 4.2.1 Variabel Inventarisasi Aset Tetap

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel inventarisasi aset tetap dalam penelitian ini digunakan tiga pernyataan yang diambil dari indikator, yaitu proses inventarisasi aset tetap, pembaruan *database* aset tetap, dan akurasi pendataan aset tetap.



**Tabel 4.3 Tanggapan Responden terhadap Inventarisasi Aset Tetap**

No.	Indikator	Indeks	STD. Dev	Kriteria
1	Proses inventarisasi aset tetap	3,75	0,750	Tinggi
2	Pembaruan <i>database</i> aset tetap	3,92	0,892	Tinggi
3	Akurasi pendataan aset tetap	3,88	0,730	Tinggi
<b>Nilai Indeks</b>		<b>3,85</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3, tanggapan tentang indikator variabel inventarisasi aset tetap dari perhitungan hasil jawaban kuesioner menunjukkan angka 3,85 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa inventarisasi aset tetap pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah masuk kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan inventarisasi aset tetap.

Indikator tertinggi dari variabel inventarisasi aset tetap adalah indikator pembaruan *database* aset tetap dengan nilai sebesar 3,92. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah memiliki komitmen untuk tertib dalam melakukan pembaruan *database* aset tetap. Adapun indikator terendah adalah indikator proses inventarisasi aset tetap dengan skor nilai 3,75. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah, meskipun nilainya paling

rendah dibanding indikator yang lain, masih memiliki komitmen yang tinggi untuk tertib melakukan proses inventarisasi aset tetap.

#### 4.2.2 Variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel pengawasan dan pengendalian aset tetap pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah dalam penelitian ini digunakan empat pernyataan yang diambil dari indikator, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), tindak lanjut audit, serta penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung.

**Tabel 4.4 Tanggapan Responden terhadap Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap**

No.	Indikator	Indeks	STD. Dev	Kriteria
1	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tetap	3,95	0,691	Tinggi
2	Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	3,77	0,704	Tinggi
3	Tindak lanjut audit	4,11	0,685	Tinggi
4	Penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung	4,17	0,719	Tinggi
<b>Nilai Indeks</b>		<b>4,00</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4, tanggapan tentang indikator pengawasan dan pengendalian aset tetap dari perhitungan hasil jawaban kuesioner menunjukkan

angka 4,00 yang menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah masuk kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator tertinggi dari variabel pengawasan dan pengendalian aset tetap adalah penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung sebesar 4,17. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap membutuhkan penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung yang memadai agar dapat terlaksana dengan baik. Adapun indikator terendah adalah penggunaan aplikasi SIMAN yang mempunyai nilai sebesar 3,77. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi SIMAN dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset tetap, meskipun nilainya masih masuk kategori tinggi, masih perlu ditingkatkan penggunaannya karena nilainya lebih kecil dibandingkan indikator yang lain.

#### **4.2.3 Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia**

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah dalam penelitian ini digunakan tujuh pernyataan yang diambil dari indikator, yaitu pengetahuan, keterampilan, keaktifan, kualitas, pengelolaan SDM, koordinasi, dan peningkatan SDM.

**Tabel 4.5 Tanggapan Responden terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

No.	Indikator	Indeks	STD. Dev	Kriteria
1	Pengetahuan	2,93	1,350	Sedang
2	Keterampilan	3,77	0,842	Tinggi
3	Keaktifan	3,79	0,884	Tinggi
4	Kualitas	3,96	0,756	Tinggi
5	Pengelolaan SDM	3,64	0,947	Sedang
6	Koordinasi	3,97	0,800	Tinggi
7	Peningkatan SDM	3,60	0,924	Sedang
<b>Nilai Indeks</b>		<b>3,67</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5, tanggapan tentang indikator kualitas sumber daya manusia dari perhitungan hasil jawaban kuesioner menunjukkan angka 3,67 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah masuk kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memperoleh perhatian dan dukungan yang baik dari pimpinan.

Indikator tertinggi dari variabel kualitas sumber daya manusia adalah koordinasi dengan nilai sebesar 3,97. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam pengelolaan barang milik negara telah dilaksanakan dengan baik. Adapun indikator terendah adalah indikator pengetahuan dengan nilai sebesar 2,93. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam

pengelolaan barang milik negara masih perlu ditingkatkan karena masuk kriteria sedang. Peningkatan tersebut dilakukan dengan senantiasa memperbarui dan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.

#### 4.2.4 Variabel Optimalisasi Aset Tetap

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel optimalisasi aset tetap pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah dalam penelitian ini digunakan empat pernyataan yang diambil dari indikator, yaitu pelaksanaan optimalisasi aset tetap, pelibatan pihak ketiga, peningkatan PNBPN, dan efisiensi pelaksanaan.

**Tabel 4.6 Tanggapan Responden terhadap Optimalisasi Aset Tetap**

No.	Indikator	Indeks	STD. Dev	Kriteria
1	Pelaksanaan optimalisasi aset tetap	4,08	0,813	Tinggi
2	Pelibatan pihak ketiga	4,07	0,718	Tinggi
3	Peningkatan PNBPN	3,93	0,772	Tinggi
4	Efisiensi pelaksanaan	4,01	0,825	Tinggi
<b>Nilai Indeks</b>		<b>4,02</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6, tanggapan tentang indikator variabel optimalisasi aset tetap dari perhitungan hasil jawaban kuesioner menunjukkan angka 4,02 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa optimalisasi aset tetap pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah masuk kategori tinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa satuan kerja pengadilan telah berusaha melakukan langkah-langkah optimalisasi aset tetap.

Indikator tertinggi dari variabel optimalisasi aset tetap adalah pelaksanaan optimalisasi aset tetap dengan nilai sebesar 4,08. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan optimalisasi aset tetap telah dilakukan dengan baik. Adapun indikator terendah adalah peningkatan PNBP dengan skor nilai 3,93. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilainya masih termasuk kriteria tinggi, tetapi optimalisasi aset tetap harus tetap mempertimbangkan peningkatan nilai PNBP yang diterima.

### **4.3 Analisis Statistik**

Analisis data dilakukan untuk menguji validitas dari masing-masing indikator dan reliabilitas dari konstruk. Kriteria validitas diukur dengan *convergent validity*, sedangkan *reliability* konstruk diukur dengan *composite reliability*.

#### **4.3.1 Evaluasi *Measurement (Outer) Model***

Model ini menspesifikasi hubungan antarvariabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Berikut uji yang dilakukan pada *outer model*.

#### 4.3.1.1 Uji Validitas dengan *Convergent Validity*

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji ini dilakukan dengan menggunakan ukuran *convergent validity* pada PLS. Nilai *convergent validity* dari masing-masing indikator dapat dilihat dari nilai *loading*. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai *loading* di atas 0,7. Menurut Chin (1998), pada penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,6 dianggap cukup memadai.

**Tabel 4.7 Result for Outer Loading**

Idk.	Inventarisasi Aset Tetap	Kualitas SDM	Optimalisasi Aset Tetap	Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap
X1.1	0,748			
X1.2	0,888			
X1.3	0,814			
X2.1				0,839
X2.2				0,687
X2.3				0,747
X2.4				0,771
Y1.1			0,751	
Y1.2			0,732	
Y1.3			0,805	
Y1.4			0,809	
Z1.1		0,552		
Z1.2		0,638		
Z1.3		0,801		
Z1.4		0,505		
Z1.5		0,581		
Z1.6		0,655		
Z1.7		0,761		

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa belum semua item kuesioner yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah valid sehingga harus dipotong.

**Tabel 4.8 Result for Outer Loading**

Idk.	Inventarisasi Aset Tetap	Kualitas SDM	Optimalisasi Aset Tetap	Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap
X1.1	0,748			
X1.2	0,888			
X1.3	0,814			
X2.1				0,839
X2.2				0,687
X2.3				0,747
X2.4				0,771
Y1.1			0,751	
Y1.2			0,733	
Y1.3			0,805	
Y1.4			0,808	
Z1.2		0,677		
Z1.3		0,835		
Z1.6		0,700		
Z1.7		0,773		

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa syarat tersebut telah terpenuhi sehingga semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity* yang baik artinya hasil analisis data dapat diterima karena nilai yang menggambarkan hubungan antarkonstruk berkembang. Adapun metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat *Square Root of Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini.



**Tabel 4.9 Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	$\sqrt{\text{AVE}}$
Inventarisasi aset tetap	0,670	0,818
Kualitas sumber daya manusia	0,561	0,748
Optimalisasi aset tetap	0,601	0,775
Pengawasan dan pengendalian aset tetap	0,582	0,762

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.9 menunjukkan nilai  $\sqrt{\text{AVE}}$  di atas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid. Nilai  $\sqrt{\text{AVE}}$  yang paling rendah adalah sebesar 0,748, yaitu pada konstruk kualitas sumber daya manusia.

#### 4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Pengukuran *reliability* dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang, terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6 (Ghozali, 2006).

**Tabel 4.10 Cronbach Alpha**

Variabel	Cronbach Alpha
Inventarisasi aset tetap	0,752
Kualitas sumber daya manusia	0,737
Optimalisasi aset tetap	0,780
Pengawasan dan pengendalian aset tetap	0,758

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2023

Tabel 4.10 menunjukkan dari hasil *cronbach alpha* masing-masing konstruk baik, yaitu di atas 0,6.

- Selain dari *cronbach alpha*, untuk menilai reliabilitas suatu konstruk dapat juga dilakukan dengan melihat *composite reliability* antarkonstruk dengan indikator-indikatornya memberikan hasil yang baik, yaitu di atas 0,7 di mana hasil *loading factor* 0,7 ke atas adalah baik.

**Tabel 4.11 Composite Reliability**

Variabel	Composite Reliability
Inventarisasi aset tetap	0,858
Kualitas sumber daya manusia	0,835
Optimalisasi aset tetap	0,857
Pengawasan dan pengendalian aset tetap	0,847

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.11 menunjukkan dari hasil *composite reliability* masing-masing konstruk adalah baik, yaitu di atas 0,7. Menurut Chin (1998), suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilainya di atas 0,7 serta dapat

dipertahankan dan diterima pada nilai 0,5 hingga 0,6. Terlihat di sini nilai untuk keseluruhan variabel memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 artinya memiliki nilai reliabilitas yang baik dan dapat digunakan untuk proses penelitian selanjutnya. Yang dimaksud dengan reliabel di sini adalah bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian nyata sesuai dengan kondisi riil objek penelitian.

#### 4.3.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *outer model*, berikutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Berikut adalah nilai *R-Square* pada konstruk:

**Tabel 4.12 R-Square**

Variabel	Sebelum Moderasi	Sesudah Moderasi
Optimalisasi aset tetap	0,777	0,785

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.12 menunjukkan *R-Square* sebelum moderasi memberikan nilai 0,777 untuk konstruk optimalisasi aset tetap yang berarti bahwa optimalisasi aset tetap mampu menjelaskan varians inventarisasi aset tetap dan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap sebesar 77,7%, sisanya 22,3% dijelaskan variasi lain yang tidak masuk dalam model. Nilai *R-Square* juga terdapat pada optimalisasi aset tetap yang dimoderasi oleh kualitas SDM antara inventarisasi aset tetap dan pengawasan dan pengendalian aset tetap, yaitu sebesar 78,5%, sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk ke dalam model ini.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Uji Hipotesis Sebelum Moderasi**

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values
Inventarisasi aset tetap → optimalisasi aset tetap	0,519	0,511	0,070	7,375	0,000
Pengawasan dan pengendalian aset tetap → optimalisasi aset tetap	0,433	0,444	0,077	5,597	0,000

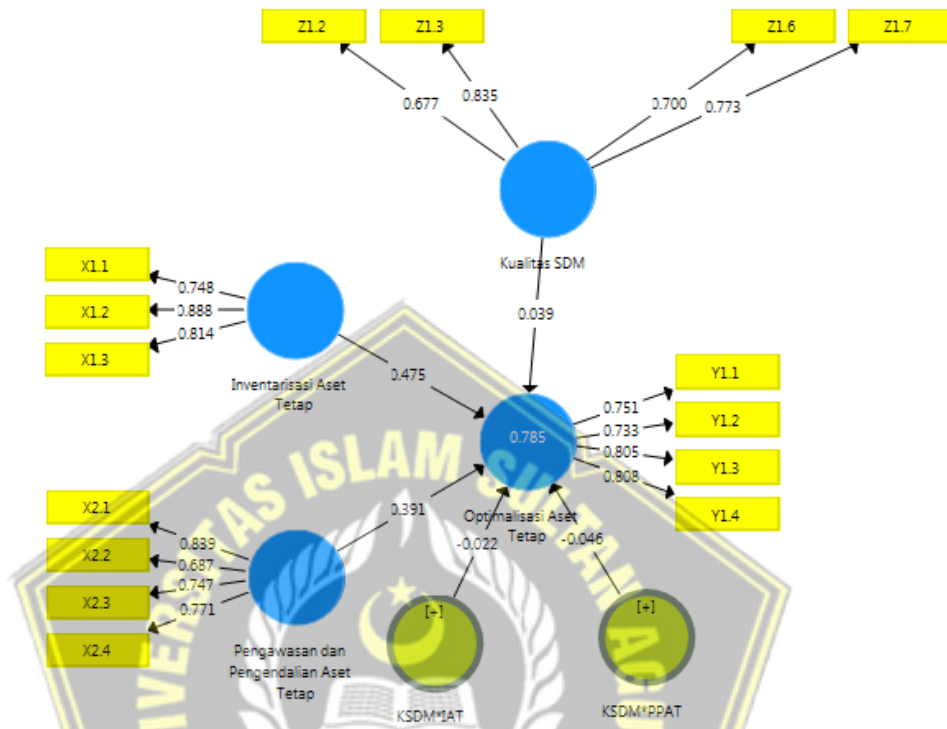
Sumber: Data primer yang diolah, 2023

**Tabel 4.14 Uji Hipotesis Setelah Moderasi**

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values
Inventarisasi aset tetap → optimalisasi aset tetap	0,475	0,475	0,083	5,695	0,000
KSDM*IAT → optimalisasi aset tetap	-0,022	-0,036	0,092	0,236	0,813
KSDM*PPAT → optimalisasi aset tetap	-0,046	-0,026	0,094	0,488	0,626
Pengawasan dan pengendalian aset tetap → optimalisasi aset tetap	0,391	0,396	0,091	4,283	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berikut adalah diagram nilai T-statistik berdasarkan *output* dengan SmartPLS versi 3:



**Gambar 4. 1 Algorithm Moderation**

Untuk menentukan suatu hipotesis diterima atau tidak dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan syarat jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka hipotesis diterima. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan probabilita ( $\alpha$ ) 0,05 dan derajat bebas (df) pengujian adalah

$$\begin{aligned} df &= (n - k) \\ &= (75 - 4) \\ &= 71 \end{aligned}$$

sehingga nilai t-tabel untuk  $df = 71$  tabel t pengujian dua sisi (*two tailed*) ditemukan koefisien sebesar 1,97.

Sehingga persamaan yang terbentuk berdasarkan tabel di atas adalah

$$\text{Persamaan: } Y = 0,475 X_1 + 0,391 X_2 - 0,022 \text{ Mod}_1 - 0,046 \text{ Mod}_2$$

#### **4.4.1 Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap**

Pengujian hipotesis kesatu ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa nilai *original sample estimate* inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap sebesar 0,475 artinya semakin baik inventarisasi aset tetap akan meningkatkan optimalisasi aset tetap. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-statistik sebesar  $5,695 > t\text{-tabel } 1,97$  dengan *P-Values* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan. Dengan demikian,  $H_1$  dalam penelitian ini yang menyatakan apabila inventarisasi aset tetap baik maka akan meningkatkan optimalisasi aset tetap sehingga  $H_1$  adalah *diterima*.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap**

Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa nilai pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap sebesar 0,391 yang menunjukkan bahwa arah hubungan adalah positif. Nilai T-statistik sebesar  $4,283 > 1,97$  dengan *P-Values* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan. Dengan demikian,  $H_2$  dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap baik maka akan menaikkan optimalisasi aset tetap adalah *diterima*.

#### **4.4.3 Dampak Moderasi Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap**

Pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap yang dimoderisasi oleh kualitas sumber daya

manusia sebesar -0,022 dengan nilai T-statistik sebesar  $0,236 < 1,97$  serta P-Values sebesar  $0,813 > 0,05$  menunjukkan bahwa hubungan antara inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap tidak dapat dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, H<sub>3</sub> dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada hubungan antara inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap yang dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia adalah *ditolak*.

#### **4.4.4 Dampak Moderasi Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap terhadap Optimalisasi Aset Tetap**

Pengujian hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap yang dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia sebesar -0,046 dengan nilai T-statistik sebesar  $0,488 < 1,97$  serta *P-Values* sebesar  $0,626 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap tidak dapat dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, H<sub>4</sub> dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap yang dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia adalah *ditolak*.

## 4.5 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan memaparkan hasil dari pengujian variabel dalam penelitian ini secara keseluruhan dan mendalam. Berdasarkan olah data deskriptif dan olah data menggunakan PLS untuk mengetahui pengujian hipotesis maka didapatkan pembahasan sebagai berikut.

### 4.5.1 Inventarisasi Aset Tetap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Hal tersebut berarti bahwa inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan optimalisasi aset tetap.

Secara teknis, kegiatan inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai aset-aset tetap yang dimiliki, baik aset yang dalam kondisi telah dimanfaatkan maupun dalam kondisi *idle* (menganggur). Hal tersebut tentunya mempunyai peran yang sangat penting sebagai penentu dalam rangka mendayagunakan setiap aset tetap secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam inventarisasi aset tetap, yaitu proses inventarisasi aset tetap, pembaruan *database* aset tetap, dan akurasi pendataan aset tetap. Secara berturut-turut, nilai indeks untuk masing-masing indikator tersebut adalah 3,75, 3,92, dan 3,88. Berarti semuanya masuk kriteria tinggi. Karena itu,



ketiga indikator tersebut harus diperhatikan agar inventarisasi aset tetap dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi aset tetap.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2020), Jusmin & Nursalim (2018), Pauweni et al. (2017), Demetouw et al. (2017), dan Nurdiana et al. (2016).

#### **4.5.2 Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan dan pengendalian aset tetap yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan optimalisasi aset tetap.

Secara teknis, kegiatan pengawasan dan pengendalian aset tetap yang telah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) secara signifikan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset tetap yang dimiliki dan tentunya tetap didukung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian lainnya.

Sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset, penggunaan aplikasi SIMAN, tindak lanjut audit, serta penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung. Secara berturut-turut, nilai indeks untuk masing-masing indikator tersebut adalah 3,95, 3,77, 4,11, dan 4,17. Berarti semuanya masuk kriteria tinggi. Karena itu, ketiga indikator tersebut harus diperhatikan agar

pengawasan dan pengendalian aset tetap dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi aset tetap.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriastiti et al. (2020), Jusmin & Nursalim (2018), Antoh (2017), Demetouw et al. (2017), dan Nurdiana et al. (2016).

#### **4.5.3 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi variabel moderasi yang mampu memperkuat hubungan antara inventarisasi aset tetap dan optimalisasi aset tetap serta memperkuat hubungan antara pengawasan dan pengendalian aset tetap dan optimalisasi aset tetap. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap dan juga hubungan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

Sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, setidaknya ada tujuh indikator yang perlu diperhatikan dalam kualitas sumber daya manusia, yaitu pengetahuan, keterampilan, keaktifan, kualitas, pengelolaan SDM, koordinasi, dan peningkatan SDM. Secara berturut-turut, nilai indeks untuk masing-masing indikator tersebut adalah 2,93, 3,77, 3,79, 3,96, 3,64, 3,97, dan 3,60. Berarti ada empat indikator yang masuk kategori tinggi, yaitu keterampilan, keaktifan, kualitas, dan koordinasi. Adapun sisanya, yaitu pengetahuan, pengelolaan sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya manusia masuk

kategori sedang. Berikut penjelasan atas tidak maksimalnya ketiga indikator tersebut.

1) Pengetahuan

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh hasil bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola barang milik negara pada satuan kerja masih banyak yang tergolong pegawai baru sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan barang milik negara, termasuk aset tetap, masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Selain itu, pengetahuan pengelola barang milik negara yang dipunyai juga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk optimalisasi aset tetap karena latar belakang disiplin ilmu/pendidikannya yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan barang milik negara.

2) Pengelolaan sumber daya manusia

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang mengelola barang milik negara pada satuan kerja masih belum maksimal. Hal tersebut tecermin dari masih ditemukannya satuan kerja yang dalam menunjuk pengelola barang milik negara belum memperhatikan analisis beban kerja. Penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus mengelola barang milik negara. Banyak di antara mereka yang merangkap pekerjaan di luar pekerjaan sebagai pengelola barang milik negara. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan optimalisasi aset tetap.

### 3) Peningkatan sumber daya manusia

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh hasil bahwa banyak pengelola barang milik negara yang belum diikutsertakan dalam bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan tentang aset tetap. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kuota bimtek dan pelatihan. Selain itu, satuan kerja juga kurang secara aktif mencari informasi mengenai bimtek dan pelatihan yang ada. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan optimalisasi aset tetap karena peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak tercapai yang menyebabkan pengelolaan aset tetap tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum memberikan dukungan untuk meningkatkan optimalisasi aset tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang mengelola aset tetap masih belum sesuai dalam mengimplementasikan pengelolaan aset tetap yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan optimalisasi aset tetap.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pekei (2019).

#### **4.5.4 Optimalisasi Aset Tetap**

Dari lima tahapan manajemen aset menurut Siregar (2004) yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, optimalisasi aset sendiri dapat dikatakan sebagai tujuan utama dalam manajemen aset. Dalam tataran teknis, pelaksanaannya pada instansi

pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi aset tetap, yaitu pelaksanaan optimalisasi aset tetap, pelibatan pihak ketiga, peningkatan PNBP, dan efisiensi pelaksanaan. Secara berturut-turut, nilai indeks untuk masing-masing indikator tersebut adalah 4,08, 4,07, 3,93, dan 4,01. Berarti semuanya masuk kriteria tinggi. Karena itu, ketiga indikator tersebut harus diperhatikan agar optimalisasi aset tetap dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi aset tetap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Rumusan Masalah**

Berdasarkan kontroversi studi (*research gap*) dan fenomena bisnis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mengembangkan model optimalisasi aset tetap” dengan studi kasus pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut.

- 1) Pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

Dalam penelitian ini, inventarisasi aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap.

- 2) Pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

Dalam penelitian ini, pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap.

- 3) Dampak moderasi kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

- 4) Dampak moderasi kualitas sumber daya manusia dalam pengaruh pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

### **5.1.2 Simpulan Hipotesis**

Berdasarkan kajian pustaka yang komprehensif dan mendalam terdapat empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil pengujian data empiris dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Apabila inventarisasi aset tetap baik maka optimalisasi aset tetap makin meningkat.
- 2) Apabila pengawasan dan pengendalian aset tetap baik maka optimalisasi aset tetap makin meningkat.
- 3) Kualitas sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.
- 4) Kualitas sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

### **5.2 Implikasi Teoritis**

- 1) Penelitian ini membuktikan bahwa inventarisasi aset tetap serta pengawasan dan pengendalian aset tetap yang baik dapat meningkatkan optimalisasi aset tetap.

- 2) Kualitas sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap dan juga hubungan pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap.

### **5.3 Implikasi Manajerial**

- 1) Dalam rangka meningkatkan optimalisasi aset tetap diperlukan adanya pelaksanaan inventarisasi aset tetap serta pengawasan dan pengendalian aset tetap yang baik. Karena itu, satuan kerja harus melaksanakan inventarisasi aset tetap serta pengawasan dan pengendalian aset tetap dengan baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan penyusunan standar operasional prosedur yang memadai sehingga dapat menjadi panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional inventarisasi aset tetap serta pengawasan dan pengendalian aset tetap berjalan dengan baik dan lancar.
- 2) Kualitas sumber daya manusia belum memberikan dukungan untuk meningkatkan optimalisasi aset tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang mengelola aset tetap masih belum sesuai dalam mengimplementasikan pengelolaan aset tetap yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan optimalisasi aset tetap. Karena itu, perlu penataan kembali terhadap sumber daya manusia yang mengelola aset tetap sesuai kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan.



#### **5.4 Keterbatasan Studi**

- 1) Objek penelitian ini hanya terbatas pada satuan kerja pengadilan di wilayah Jawa Tengah yang tentunya memiliki karakteristik responden yang berbeda dengan wilayah lain sehingga kurang dapat digeneralisasikan dengan baik di tempat penelitian yang berbeda.
- 2) Responden hanya dibatasi pada kuasa pengguna barang yang peranannya lebih ke arah kebijakan strategis satuan kerja.
- 3) Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner sehingga faktor subjektivitas selalu ada.
- 4) Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap serta pengawasan dan pengendalian aset tetap terhadap optimalisasi aset tetap. Karena itu, diperlukan variabel lain sebagai variabel moderasi pengganti kualitas sumber daya manusia.

#### **5.5 Agenda Penelitian Mendatang**

- 1) Objek penelitian dapat diterapkan pada satuan kerja pengadilan di wilayah lain atau juga dikembangkan ke beberapa wilayah sehingga cakupannya lebih luas.
- 2) Responden perlu diperluas, tidak hanya kuasa pengguna barang, tetapi juga pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara lainnya yang ada pada satuan kerja, misalnya, petugas pengelola barang milik negara, operator SIMAN, dan kabag/kasubbag yang menangani masalah barang milik negara.
- 3) Penelitian berikutnya dapat didukung dengan metode observasi.

- 4) Kompetensi sumber daya manusia dapat dipertimbangkan sebagai variabel moderasi pengganti kualitas sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pertimbangan memilih kompetensi sumber daya manusia karena bersifat spesifik yang mana dalam dunia kerja perlu spesifikasi keterampilan kerja. Karena itu, kompetensi sumber daya manusia perlu diperhatikan agar sesuai dengan uraian tugas pengelola aset tetap sehingga dengan kompetensi yang sesuai dapat mengoptimalkan aset tetap.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, A. E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai). *Jumabis*, 1(2), 259827. <https://www.neliti.com/publications/259827/pengaruh-manajemen-aset-dalam-optimalisasi-aset-tetap-tanah-dan-bangunan-pemerin#cite>
- Ardiani, S. (2020). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 20–31. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3865157>
- Atikoh, N., Febrian, E., & Hendrawan, R. (2017). Fixed Asset Management in the Indonesian Government Agencies: a Case Study at Ministry of Trade. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(12), 674–694. <https://www.researchgate.net/publication/341708959>
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295–336.
- Demetouw, M., Salle, A., & Asnawi, M. (2017). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3), 217598. <https://core.ac.uk/download/pdf/228786000.pdf>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia. (2001). *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara*. <https://rng3.pu.go.id/assets/peraturan/5/NO%20373%202001.pdf>
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-17-tahun-2003>
- Indonesia. (2004a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2004>

- Indonesia. (2004b). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-15-tahun-2004>
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92*. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-27-tahun-2014>
- Indonesia. (2020a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972*. <https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-115-pmk-06-2020-tahun-2020>
- Indonesia. (2020b). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 142*, 1–66. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-28-tahun-2020>
- Jusmin, & Nursalim. (2018). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 6(2), 139–147. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/2933/1762>
- Nurdiana, S. R., Handajani, L., & Alamsyah, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Mataram. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 1–15. <http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/4>
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2), 50–61. <https://doi.org/10.35800/JJS.V8I2.17172>
- Pekei, B. (2019). Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi: Teori, Konsep, dan Analisis. *Jakarta: Taushia*.
- Singarimbun, M. (1995). Metode Penelitian Survai. *Jakarta: Pustaka LP3ES*.

- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEOs pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Solimun, S. (2011). *Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi*. Malang: Program Studi Statistika Universitas Brawijaya.
- Sriastiti, N. L. P., Ningsih, N. L. A. P., & Yasa, P. N. S. (2020). The Influence of Asset Management Towards Optimization of State Assets in Working Units in the Denpasar High Court Region. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Jagadhita*, 7(1), 24–38. <https://doi.org/10.22225/JJ.7.1.1414.24-38>
- Sugiana, A. G. (2008). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Umar, D. H. (2012). *Pelatihan Metodologi Penelitian*. Bogor: Modul.
- Umbora, E., Falah, S., & Pangayow, B. (2018). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1, 90–112. [https://doi.org/10.52062/jurnal\\_aaa.v1i2.10](https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.10)
- Widodo. (2019). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Rajawali Pers.

